

## **ABSTRACT**

*The focus of this research is the implementation of advertisement policy in Bandung Regency which is not optimal, thus exposed to the risk of potential tax revenue sources lost that have not been touched in the advertisement. This phenomenon calls for effective policy implementation strategies in the optimization of advertisement tax revenue as a source of region income.*

*Sub focus of this research is the application of the content and context of policy implementation as a dimension of advertisement organizing policy implementation in the in the Department of Revenue and Finance Management Regency Bandung . Based on the problem statement presented in the focus of the studies , research questions are divided into :*

- 1 .What factors lead to less than optimal implementation advertisement policy administration at the Department of Revenue and Financial Management Bandung regency*
- 2. What should be done by the advertisement organizing policy implementors in the Department of Revenue and Financial Management Bandung regency.*
- 3. What are the effective policy implementation strategies to achieve the optimization advertisement organizing tax revenue to the Department of Revenue and Financial Management Bandung regency.*

*The research method used in this study is qualitative which selected to reveal what happens in reality and this study empirically observe and explore more of the behavior of the object under study.*

*The results showed that the findings reinforce the concept of policy implementation of Grindle (1980). It should be added that the concept is ; attitudes and ethical behavior,policy makers acceptability, coordination among regions and institutions to integrate operational management institutions activity and relevant stakeholders, law enforcement and evaluation of a holistic policy on aspects that can improve the optimization of advertisement tax revenue.*

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame belum optimal, sehingga dihadapkan pada resiko hilangnya sumber penerimaan dari potensi pajak reklame. Fenomena tersebut menuntut adanya strategi implementasi kebijakan yang efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sub fokus penelitian ini adalah penerapan pendekatan *content of policy* dan *context of implementation* sebagai dimensi implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Berdasarkan *problem statement* yang dikemukakan pada fokus penelitian, selanjutnya diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan pelaksana kebijakan penyelenggaraan reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
3. Strategi implementasi kebijakan apa yang efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*eksploratory sequential*). Pendekatan kualitatif dipilih sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengungkap dan menggambarkan suatu realitas administrasi publik tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dengan mengembangkan konsep melalui fakta dan data secara cermat dan menarik makna dari ide-ide, sikap dan motif yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan *cross check* terhadap hasil analisis data kualitatif dengan tingkat analisis yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan berupa pengembangan teori yang memperkuat konsep implementasi kebijakan Grindle (1980) bahwa:.. ”optimalisasi penerimaan pajak reklame dapat dicapai apabila pada dimensi *content of policy* dikembangkan parameter: (1) sikap dan perilaku yang beretika. (*attitudes and ethical behavior* ) dan (2) Akseptabilitas pelaksana kebijakan. (*policy makers acceptability* ). Sedangkan pada dimensi *context of implementation* dikembangkan parameter : (1) evaluasi kebijakan yang bersifat holistik ( *evaluation of a holistic policy*); 2) Koordinasi antar pemerintah daerah dan antar institusi (*coordination among local governments and inter-institutions*) serta; (3) Penegakan aturan (*law enforcement* ).